

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
OLEH PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI DESA CISADAP KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS**

Risa Neneng Karisma

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: risa.cmz99@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan bentuk atau perwujudan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan cukup baik. Namun masih ada beberapa indikator yang pelaksanaannya masih belum optimal. Mengingat masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan lagi, seperti peningkatan sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping mengenai informasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta koordinasi antara pendamping dengan Pemerintah Desa perlu ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan; Program Keluarga Harapan; Penanggulangan Kemiskinan*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan merupakan bentuk atau perwujudan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemiskinan itu sendiri merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan

kesehatan. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Kemiskinan itu sendiri dapat juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum.

Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap sendiri sudah

berjalan dari tahun 2009 dan terlaksana sesuai dengan harapan sehingga pelaksanaan program ini terbilang sudah cukup baik. Adapun persoalan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap yakni mengenai kelayakan dari peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan itu sendiri. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Cisadap saat ini terdapat 253 peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal terlihat bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum efektif terutama masalah bantuan sosial Program Keluarga Harapan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Adapun dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan salah satu proses yang sangat penting.

Lester dan Stewart (Kusumanegara, 2010: 97) berpendapat bahwa 'Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik'. Sementara itu, secara lebih luas Kusumanegara (2010: 97) mendefinisikan bahwa: "Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses

administrasi dari hukum (statuta) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan".

2. Model Implementasi Kebijakan menurut van Metter & van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn (Agustino, 2017: 133) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksana kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut van Metter & van Horn (Agustino, 2017: 133), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

3. Program Keluarga Harapan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Program Keluarga Harapan dirumuskan pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Dalam Buku Pedoman Program Keluarga Harapan dirumuskan bahwa “Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)*”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan secara tunai. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dirumuskan bahwa “Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga miskin dan/atau seseorang miskin,

tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017: 9) adalah: Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Waktu dan tempat penelitian berada di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan lamanya penelitian yaitu 6 (enam) bulan. Sumber data diperoleh dari informan yang terdiri dari Kasi Kesejahteraan kantor Kepala Desa, pendamping Program Keluarga Harapan, dan Keluarga Penerima Manfaat. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, dan perekam suara. Teknik analisis data menggunakan model interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan melakukan pembahasan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan oleh pendamping Program Keluarga Harapan, pada umumnya implementasi Program Keluarga Harapan belum berjalan dengan baik seperti implementasi Program Keluarga Harapan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, pendamping belum komunikatif dalam menyampaikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat, kurangnya koordinasi antara pendamping Program Keluarga Harapan dengan Pemerintah Desa.

Pembahasan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan oleh pendamping Program Keluarga Harapan dengan berdasarkan teori van Metter dan van Horn (Agustino, 2017: 133) bahwa implementasi kebijakan berdasarkan pada enam dimensi yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
2. Sumber Daya;
3. Karakteristik Agen Pelaksana;
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana;
5. Komunikasi Antar-organisasi dan Aktivitas Pelaksana;
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Berdasarkan pada hal tersebut, kemudian peneliti dapat menjelaskan mengenai observasi lapangan mengenai implementasi Program

Keluarga Harapan oleh pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan mengacu pada sub variabel sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi Program Keluarga Harapan oleh pendamping Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat bahwa implementasi Program Keluarga Harapan oleh pendamping belum sepenuhnya menerapkan Standar Operasional Prosedur seperti tidak melibatkan RT dan RW dalam pendataan anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

2. Sumber Daya

Implementasi Program Keluarga Harapan oleh pendamping Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, pendamping belum mampu merubah pola pikir Keluarga Penerima Manfaat mengenai kegunaan dana bantuan sebagaimana tujuan dari Program Keluarga Harapan, serta pendamping harus meningkatkan kompetensinya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sehingga Program Keluarga Harapan dapat berjalan dengan optimal.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada dimensi karakteristik agen pelaksana belum berjalan dengan baik, masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memahami penyampaian pengetahuan serta pemahaman yang disampaikan oleh pendamping, dimana

pendamping bisa lebih baik dalam menyampaikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat supaya tujuan mensejahterakan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan tercapai dengan optimal.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Dispostion*) Para Pelaksana

Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan dalam dimensi sikap atau kecenderungan (*dispostion*) para pelaksana, pendamping belum kompeten dan komunikatif dalam menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat kepada Keluarga Penerima Manfaat.

5. Komunikasi Antar-organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan dalam dimensi komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana belum berjalan dengan baik, pendamping belum menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada Keluarga Penerima Manfaat hal tersebut dilihat masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang belum mengetahui tujuan dari implementasi Program Keluarga Harapan, serta pendamping harus sering berkoordinasi dengan pemerintah desa.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan dalam dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik belum berjalan dengan baik, adanya hubungan yang tidak baik antara warga masyarakat dengan Keluarga Penerima Manfaat dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin juga mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan sedangkan masyarakat tersebut tidak tahu mengenai kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

1. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Untuk mengetahui mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi Program Keluarga Harapan kurang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, yaitu pendamping serta Pemerintah Desa tidak mengetahui apa yang ada dalam Standar Operasional Prosedur.

Tujuan implementasi Program Keluarga Harapan yaitu membantu mengurangi keluarga miskin belum

terlaksana dengan baik, hal tersebut dilihat masih adanya keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

2. Sumber Daya

Kompetensi pendamping perlu ditingkatkan supaya Keluarga Penerima Manfaat dapat memahami tujuan dari Implementasi Program Keluarga Harapan

Keluarga Penerima Manfaat tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan pendamping harus menyampaikan informasi mengenai dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan primer.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pendamping yang kurang memahami materi Program Keluarga Harapan yang membuat pendamping selalu melihat buku pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Pendamping belum komunikatif dalam menyampaikan informasi yang disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sehingga Keluarga Penerima Manfaat kurang memahami informasi yang disampaikan oleh pendamping.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam adanya kerjasama yang baik antara pihak pendamping Program Keluarga Harapan dengan Keluarga Penerima Manfaat yaitu pendamping sudah berusaha melakukan kerjasama

yang baik dengan Keluarga Penerima Manfaat akan tetapi masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang sulit untuk diajak bekerjasama.

Pendamping belum optimal dalam menyampaikan informasi kepada Keluarga Penerima mengenai hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat dan masih adanya Keluarga Penerima Manfaat yang tidak mengikuti pertemuan rutin yang diadakan satu bulan sekali.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pendamping belum optimal dalam menyampaikan informasi sehingga Keluarga Penerima Manfaat tidak memahami informasi yang disampaikan oleh pendamping, serta masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memperhatikan pendamping saat penyampaian informasi sehingga informasi atau pesan tidak dapat tersampaikan secara menyeluruh.

Koordinasi antara pendamping dengan Pemerintah Desa masih kurang, pendamping lebih sering berkoordinasi dengan Keluarga Penerima Manfaat.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yaitu adanya warga masyarakat yang tidak berhubungan baik dengan Keluarga Penerima Manfaat mungkin dikarenakan masyarakat tersebut ingin juga mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan Di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, hasil wawancara dan observasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan yaitu dalam pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan akan lebih memperhatikan Standar Operasional Prosedur.

Dalam pendataan keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan akan melibatkan pemerintahan yang paling bawah yaitu RT dan RW dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

2. Sumber Daya

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan yaitu untuk mengatasi adanya hambatan pendamping perlu meningkatkan kompetensinya dalam implementasi Program Keluarga Harapan.

Untuk mengatasi hambatan pendamping yang kurang komunikatif dalam penyampaian informasi dalam

sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan yaitu untuk mengatasi hambatan pendamping memahami dahulu materi mengenai Program Keluarga Harapan sebelum menyampaikan pengetahuan mengenai Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Untuk mengatasi hambatan pendamping lebih komunikatif dalam menyampaikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Keluarga Penerima Manfaat.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan yaitu untuk mengatasi hambatan pendamping memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat tentang pentingnya kerjasama yang baik dengan pendamping.

Untuk mengatasi hambatan tersebut pendamping menyampaikan informasi mengenai Program Keluarga Harapan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh Keluarga Penerima Manfaat dan memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat akan pentingnya mengikuti

sosialisasi yang diadakan setiap satu bulan sekali.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan yaitu untuk mengatasi hambatan mengenai belum optimal mengenai penyampaian pesan secara menyeluruh kepada Keluarga Penerima Manfaat, pendamping menyampaikan informasi lebih jelas dan menyeluruh untuk dapat dipahami oleh Keluarga Penerima Manfaat.

Untuk mengatasi hambatan mengenai belum optimal dalam koordinasi antara pendamping Program Keluarga Harapan dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Desa harus dilibatkan dalam implementasi Program Keluarga Harapan untuk mencapai tujuan dari Program Keluarga Harapan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Keluarga Harapan yaitu untuk mengatasi hambatan mengenai belum optimal dalam adanya hubungan yang harmonis antara Keluarga Penerima Manfaat dengan warga masyarakat, diadakannya sosialisasi mengenai kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

KESIMPULAN

Implementasi Program Keluarga Harapan oleh pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Cisadap Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari beberapa dimensi yang pelaksanaannya masih belum optimal. Mengingat masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan lagi, seperti peningkatan sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping mengenai informasi Program Keluarga Harapan serta koordinasi antara pendamping dengan Pemerintah Desa perlu ditingkatkan lagi. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan diantaranya yaitu pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan tidak mematuhi apa yang ada dalam Standar Operasional Prosedur, seperti tidak melibatkan RT dan RW dalam melakukan pendataan anggota Program Keluarga Harapan serta kurangnya komunikasi antara pendamping dengan Pemerintah Desa. Pendamping belum komunikatif dalam menyampaikan informasi yang disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Penyampaian sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat oleh pendamping belum tersampaikan dengan baik. Pendamping kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, tetapi pendamping lebih sering berkoordinasi dengan Keluarga Penerima Manfaat. Upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-

hambatan yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan diantaranya yaitu pendamping lebih memperhatikan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pendamping Program Keluarga Harapan lebih komunikatif dalam menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara detail kepada Keluarga Penerima Manfaat. Pendamping melakukan penyampaian pemaparan Program Keluarga Harapan ini secara rutin tentang hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat. Pendamping menentukan jadwal pertemuan rutin dengan Pemerintah Desa secara intens.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Baswori. Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, Moh. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..* Bandung: Alfabeta.
- Wahab. Abdul, Solihin. 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Pedoman Program Keluarga Harapan Tahun 2016
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia